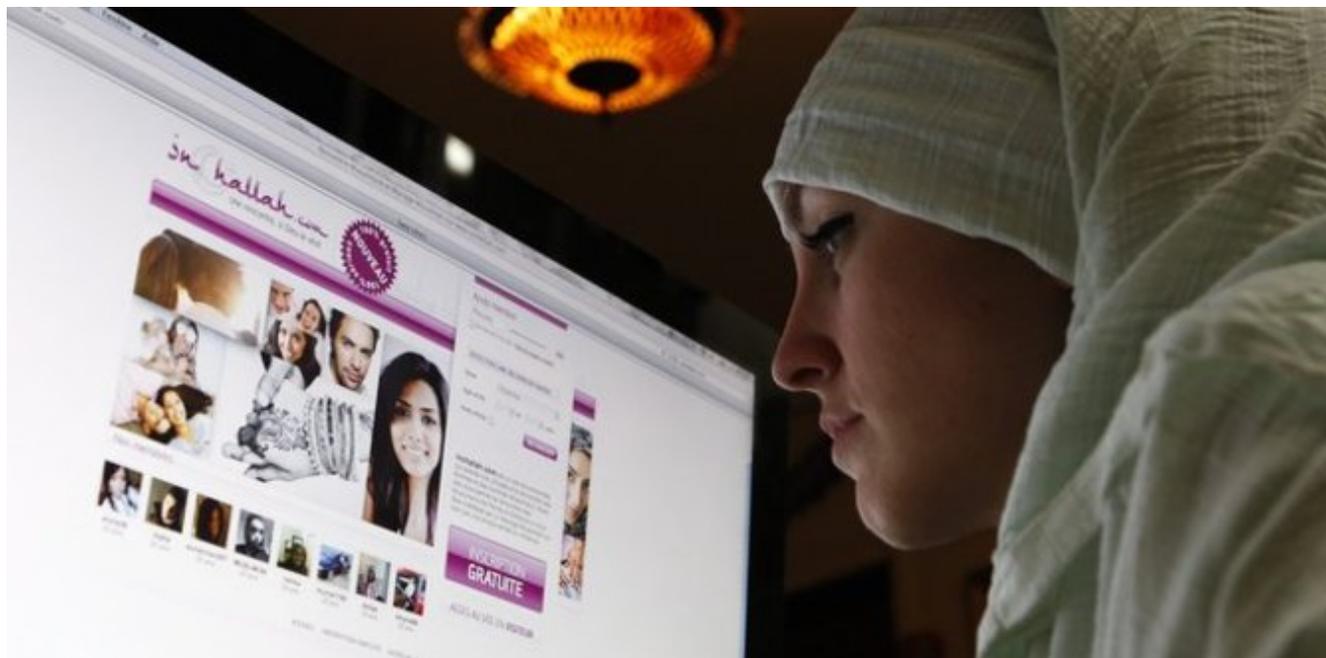


Literasi Digital Diproyeksikan Mampu Kurangi Intoleransi

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Surabaya – Konten negatif seperti [intoleransi](#) dan radikalisme bertebaran di dunia maya. Pemerintah harus mengambil tindakan konkret untuk mengatasi masalah intoleransi di jagat maya. Sebagai salah satu cara yang harus pemerintah lakukan adalah menerapkan program literasi digital kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, mengimbau hati-hati saat bermedia. Waktu menjadi pembicara di forum Indonesia merayakan kemenangan, Senin (17/5/2021) pihaknya mengingatkan masyarakat ancaman radikalisme dan intoleransi.

Pihaknya mengatakan, internet saat ini sudah terpenuhi dengan konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, bahkan muatan radikalisme atau praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak tersebut bisa kita tangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu.

Dengan memiliki kecakapan literasi digital, masyarakat dapat memilah berbagai informasi. Masyarakat mampu memahami pesan, dan berkomunikasi efektif. Selain itu juga mampu mengelola bagaimana teknologi harus kita gunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis ketika dalam penggunaan teknologi dalam sehari-hari.

“Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis maupun kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan isu provokatif, informasi hoaks, atau korban penipuan digital,” ujar Benny.

Dikatakannya, Kemenkominfo bersama Dinas Kominfo di seluruh Indonesia pun kemudian aktif melakukan literasi digital agar masyarakat dapat memilah informasi dan terhindar dari [konten radikalisme](#).

Agenda literasi digital ini dilaksanakan di 38 kota/kabupaten mulai 2021 hingga 2024, dengan menggunakan empat modul. Yakni Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital.

Dari modul tersebut, Kemenkominfo sudah membuat kegiatan berupa ruang digital untuk anak-anak, UMKM yang sudah on board di marketplace dari Kemenkominfo, program Digital Talent Scholarship (DTS), dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

“Kewaspadaan terhadap intoleransi dan radikalisme tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga seluruh masyarakat Indonesia, agar masyarakat dapat terbebas dari paham-paham yang mengancam kebhinekaan bangsa,” tuturnya.